



**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**TAHUN
2024**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

KECAMATAN KLAMBU

Jalan Raya Klambu Kudus No. 3, Klambu-Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KLAMBU

Jalan Raya Klambu Kudus Nomor 30, Klambu, Grobogan, Jawa Tengah 58154
Telepon (0292) 7702858
Laman: klambu.kec.grobogan.go.id, Pos-el kecamatanklambu@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN KLAMBU
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan klambu untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kecamatan klambu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 10 Februari 2025
KAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

RUSTAMAJI, S.S.T.P. M.Si.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19871013 200602 1 002



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Klambu merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Klambu. Kinerja Kecamatan Klambu diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Klambu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Purwodadi, 10 Februari 2025
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

RUSTAMAJI, S.S.T.P. M.Si.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19871013 200602 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	4
E. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kerja Tahun 2024	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Pengukuran Kinerja	32
B. Capaian Kinerja Organisasi	34
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2024	34
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.	36
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra	37
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar	38
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	38
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	42



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	44
C. Realisasi Anggaran	51
 BAB IV PENUTUP	 57
 LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP	60
TABEL MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026	65
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	120
PERJANJIAN KINERJA	133
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN TA. 2024	157

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Klambu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan



bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas:

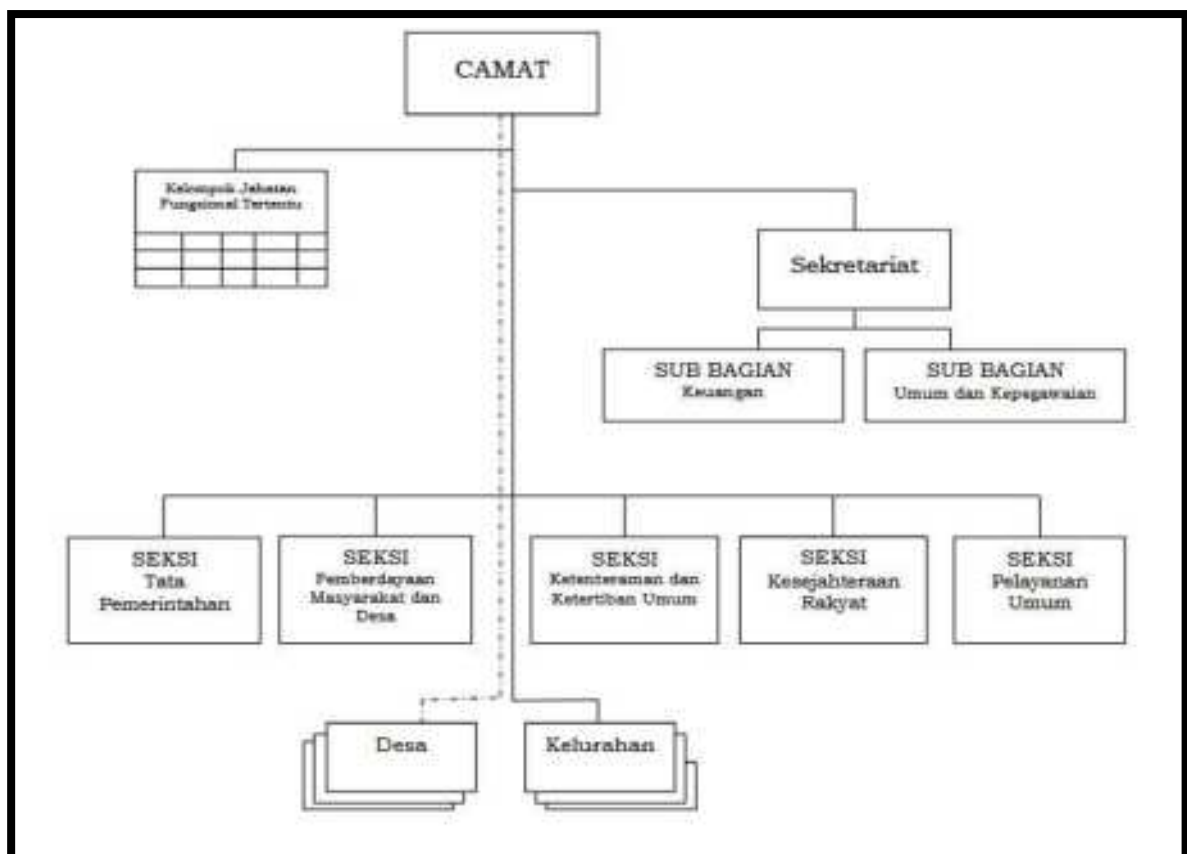
- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi :

- o penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- o pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- o pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- o pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Klambu periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM;
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Klambu periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Klambu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :



1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten



Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana

Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Klambu mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.”



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sebagai berikut :



4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
I.	Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	1.1. Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	Hasil Penilaian Mandiri	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	Camat
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	Hasil Penilaian Tingkat Kabupaten	Laporan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Tim Evaluator AKIP Kabupaten.	Camat
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %		Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	Sekcam
a.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %		Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali 100.	



			Perangkat Daerah tepat sasaran				
a.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Presentase penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dikali 100.	
a.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	
a.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 Orang/ bulan		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun Tepat Waktu	
a.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100 %		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	
a.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terpenuhi	
a.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum	100 %		Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	



			Perangkat Daerah			terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	
a.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhi	
a.4.2.	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket		Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhi	
a.4.3.	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Bahan/Material yang disediakan	3 Paket		Jumlah Penyediaan Bahan/Material Terpenuhi	
a.4.4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksana	
a.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	
a.5.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 Unit		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi	



			yang diadakan				
a.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa	
a.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	450 Laporan		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhi	
a.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Laporan		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi	
a.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi	
a.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik	
a.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	4 Unit		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhi	



a.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 Unit		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksana	
a.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	20 Unit		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi	
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %		Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	Kasi PMD
b.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %		Jumlah layanan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
b.1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan yang dilaksanakan	100 Keluarga		Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	



C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %		Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan dikali 100	Kasi Trantibum
c.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan	100 %		Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan	
c.1.1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan	100 orang		Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan	
D.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		Persentase layanan dukungan administrasi	100 %		Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi	Kasi Tapem



	PEMERINTAHAN DESA		kesekretariatan yang sesuai SOP			jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	
d.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 %		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	
d.1.1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	9 Dokumen		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klambu Tahun 2024



B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Klambu Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77.70 %
		1.1. Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70)

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa



yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Meningkatnya Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77,70%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	BB (70)

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Klambu :



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Klambu Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	Rp. 2.094.020.500
a.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp. 21.795.200
a.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Rp. 21.795.200
a.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	Rp. 1.518.039.000
a.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 org/bln	Rp. 1.518.039.000
a.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Rp. 21.943.000
a.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 paket	Rp. 21.943.000
a.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp. 123.956.000
a.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	Rp. 1.886.300



a.4.2.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	Rp. 49.000.000
a.4.3.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	Rp. 21.069.700
a.4.4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp. 52.000.000
a.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	Rp. 47.922.500
a.5.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	33 unit	Rp. 47.922.500
a.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp. 252.119.600
a.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	450 laporan	Rp. 104.950.000
a.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 laporan	Rp. 30.999.000
a.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	Rp. 116.170.600
a.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. 108.245.200
a.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	6 unit	Rp. 27.515.200
a.7.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	Rp. 75.145.000



	Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi		
a.7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	Rp. 5.585.000
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	Rp. 20.000.000
b.1.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	Rp. 20.000.000
b.1.1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	100 keluarga	Rp. 20.000.000
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	Rp. 21.953.500
c.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan	1 keg	Rp. 21.953.500
c.1.1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	100 org	Rp. 21.953.500



	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
D.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	Rp. 15.000.000
d.1.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	Rp. 15.000.000
d.1.1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 dokumen	Rp. 15.000.000
	JUMLAH			Rp. 2.150.974.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Klambu Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :



Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Meningkatnya Rata – rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77,70
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	BB (70)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Klambu Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	Rp. 2.340.221.500
a.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp. 21.795.200



a.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Rp. 21.795.200
a.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	Rp. 1.766.895.000
a.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 org/bln	Rp. 1.766.895.000
a.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Rp. 21.943.000
a.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 paket	Rp. 21.943.000
a.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp. 116.393.500
a.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	Rp. 1.886.300
a.4.2.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	Rp. 49.000.000
a.4.3.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	Rp. 21.062.200
a.4.4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp. 44.445.000
a.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	Rp. 48.040.900
a.5.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	34 unit	Rp. 48.040.900



		Disediakan		
a.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp. 252.119.600
a.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	450 laporan	Rp. 104.950.000
a.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 laporan	Rp. 30.999.000
a.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	Rp. 116.170.600
a.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. 113.034.300
a.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	6 unit	Rp. 32.304.300
a.7.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp. 75.145.000
a.7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	Rp. 5.585.000
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	Rp. 22.681.000
b.1.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	100%	Rp. 22.681.000



		Kelurahan		
b.1.1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	197 keluarga	Rp. 22.681.000
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	Rp. 21.953.500
c.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan	1 keg	Rp. 21.953.500
c.1.1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 org	Rp. 21.953.500
D.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	Rp. 15.000.000
d.1.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	Rp. 15.000.000



d.1.1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 dokumen	Rp. 15.000.000
	JUMLAH			Rp. 2.399.856.000

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Klambu Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klambu.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2024



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Klambu Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
A.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (77,70)	B (85,27)	109,74 %	Sangat Tinggi	Rata-rata Nilai IKM Triwulan I s/d IV Tahun 2024
B.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)	BB (74,1)	105,86 %	Sangat Tinggi	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Uraian penjelasan tabel :

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klambu di tahun 2024 mencapai nilai 85,27 dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 77,70 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 109,74 %. Termasuk dalam kategori capaian kinerja **sangat tinggi**.

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Kecamatan Klambu merupakan nilai evaluasi yang diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dokumen pendukung lainnya yang dilaporkan ke Bagian Organisasi Setda Grobogan dan Inspektorat Kabupaten Grobogan. Diharapkan nilai SAKIP Kecamatan Klambu meningkat setiap tahunnya sehingga menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan yang semakin baik dan akuntabel. Dapat dilihat dari tabel di atas nilai hasil Evaluasi yang diperoleh ditahun 2024 adalah 74,1, target nilai SAKIP yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 70.



Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 105,86%, masih termasuk dalam kategori capaian kinerja **sangat tinggi**.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
A.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B 76,70	B 81,35	106	B 77,20	B 82,41	106,75	B 77,70	B 85,27	109,74
B.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	B 63	B 63,27	100,42	B 65	B 64,25	98,85	BB 70	BB 74,1	105,86

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat pada Kecamatan Klambu jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya menunjukkan tren positif yang dibuktikan adanya kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, tahun



2022 106% naik menjadi 106,75% di tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 109,74%.

Sedangkan capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, cenderung stagnan dari tahun 2022 mencapai 100,42% dan tahun 2023 turun menjadi 98,85%, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024 menjadi 105,86%.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
A.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (85,27)	B (79,70)	106,99%
B.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (74,1)	BB (73,5)	100,82%

Dari analisis tabel 3.4 di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2024 pada indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat mencapai 106,99%, sehingga capaian kinerja telah melampaui target jangka menengah tahun 2026.

Sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja Tahun 2024 pada indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas



penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan mencapai 100,82%, sehingga capaian kinerja telah melampaui target jangka menengah tahun 2026.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten sekitar

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten lain

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Kabupaten			Persentase capaian	
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
A	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nihil	Nihil	Nihil	-	-
B	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nihil	Nihil	Nihil	-	-

Sebagaimana Tabel di atas, bahwa capaian kinerja Indikator Sasaran A dan B tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja di tingkat provinsi/ nasional/ daerah lain, dikarenakan indikator kinerja Kecamatan Klambu tidak dilakukan pengukuran kinerja di tingkat Provinsi/ Nasional/ daerah sekitar.

5. Analisis keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
A.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum	Nilai IKM	B (77,70)	B (85,27)	109,74 %	Kesigapan dan komitmen aparatur	Arahan dan rapat internal secara berkala oleh pimpinan



	kepada masyarakat						
B.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B (70)	B (74,1)	105,86 %	Komitmen dan Support dari Pimpinan serta Kerjasama dari Tim Internal Kecamatan	Monitoring dan evaluasi pimpinan untuk peningkatan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Klambu yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Klambu dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat tertumpu pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Klambu sebesar 85,27%



berada pada kategori “**BAIK**”. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh Kecamatan Klambu sudah baik, meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan harus segera mengelola dengan baik terkait layanan pengaduan dan masukan dari pihak penerima layanan.

Faktor pendukung keberhasilan Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klambu antara lain :

1. Kesigapan dan komitmen para aparatur demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, cermat dan sesuai dengan SOP serta standar pelayanan yang ada di Kecamatan Klambu. Pimpinan selalu memberikan arahan secara langsung dalam apel pagi dan rapat internal agar karyawan selalu mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Inovasi Pelayanan di Kecamatan Klambu untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas Pelayanan, antara lain perpanjangan jam kerja pelayanan di hari Jum'at yang biasanya sampai pukul 13.30 menjadi s.d pukul 15.30.

Indikator kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2024 yang disajikan oleh Kecamatan Klambu dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan nilai sebesar 74,1 dengan kategori BB (Sangat Baik), Interpretasi bahwa yaitu sistem dan tatanan dapat diandalkan, memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup baik.

Faktor pendukung keberhasilan indikator sasaran Nilai AKIP antara lain :



1. Adanya Komitmen dan Support dari Pimpinan serta Kerjasama dari Tim Internal Kecamatan untuk meningkatkan kinerja sehingga nilai AKIP Kecamatan bisa meningkat. Namun untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan dokumen AKIP tetap diperlukan Pelatihan atau Bimbingan Teknis penyusunan dokumen AKIP secara berkesinambungan mulai dari Pimpinan Perangkat Daerah, Pejabat Eselon dan aparatur yang mengerjakan agar dapat menyajikan laporan kinerjanya dengan baik.
2. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan dan Tim Internal Kecamatan Klambu setiap triwulan sebagai bahan evaluasi dan rencana tindaklanjut untuk perbaikan kinerja berikutnya.

Terhadap beberapa kekurangan, akan dilakukan perbaikan/solusi sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja.
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan evaluasi internal
3. Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.



6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Keg	Indikator Kinerja			Anggaran			Ting kat Efisi ensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengura ngan dengan serapan	Interpr etasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian				
1	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Rata-rata Nilai IKM B 77,7	B 85,27	110%	59.634.500	57.091.600	96%	15%	65.442.900	8.351.300	Efisien
		Nilai SAKIP OPD B 70	B 74,1	106%	2.340.221. 500	2.202.374. 224	94%	12%	2.477. 358.480	274.984. 256	Efisien
1.1	Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	B 77,7	B 85,27	110%	59.634.500	57.091.600	96%	15%	65.442.900	8.351.300	Efisien
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100%	22.681.000	20.247.400	89,2 7%	12%	22.681.000	2.433.600	Efisien
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	22.681.000	20.247.400	89,2 7%	12%	22.681.000	2.433.600	Efisien
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Sain g	197 keluarga	197 keluarga	100%	22.681.000	20.247.400	89,2 7%	12%	22.681.000	2.433.600	Efisien



	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	21.953.500	21.844.200	99,50%	1%	21.953.500	109.300	Efisien
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 keg	1 keg	100%	21.953.500	21.844.200	99,50%	1%	21.953.500	109.300	Efisien
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 org	100 org	100%	21.953.500	21.844.200	99,50%	1%	21.953.500	109.300	Efisien
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	15.000.000	15.000.000	100,00%	0%	15.000.000	-	Impas
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	15.000.000	15.000.000	100,00%	0%	15.000.000	-	Impas
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 dokum en	9 dokum en	100%	15.000.000	15.000.000	100,00%	0%	15.000.000	-	Impas
1.2	Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	B 70	B 74,1	106%	2.340.221. 500	2.202.374. 224	94%	12%	2.477. 358.480	274.984. 256	Efisien
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	2.340.221.500	2.202.374.224	94,11%	6%	2.340.221.500	137.847.276	Efisien



	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	21.795.200	21.790.000	99,9 8%	0%	21.795.200	5.200	Efisien
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	21.795.200	21.790.000	99,9 8%	0%	21.795.200	5.200	Efisien
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.766.895.000	1.662.993.745	94,1 2%	6%	1.766.895.000	103.901.255	Efisien
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 org/bln	12 org/bln	100%	1.766.895.000	1.662.993.745	94,1 2%	6%	1.766.895.000	103.901.255	Efisien
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	21.943.000	21.181.000	96,5 3%	4%	21.943.000	762.000	Efisien
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 paket	25 paket	100%	21.943.000	21.181.000	96,5 3%	4%	21.943.000	762.000	Efisien
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	116.393.500	112.375.771	96,5 5%	4%	116.393.500	4.017.729	Efisien
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	8 Paket	100%	1.886.300	1.789.000	94,8 4%	5%	1.886.300	97.300	Efisien
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	100%	49.000.000	48.829.000	99,6 5%	0%	49.000.000	171.000	Efisien
	Penyediaan Bahan/Material	3 Paket	3 Paket	100%	21.062.200	20.889.600	99,1 8%	1%	21.062.200	172.600	Efisien
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	44.445.000	40.868.171	91,9 5%	9%	44.445.000	3.576.829	Efisien
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	48.040.900	47.811.199	99,5 2%	0%	48.040.900	229.701	Efisien
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 unit	34 unit	100%	48.040.900	47.811.199	99,5 2%	0%	48.040.900	229.701	Efisien
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	252.119.600	225.366.588	89,3 9%	12%	252.119.600	26.753.012	Efisien



Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 laporan	450 laporan	100%	104.950.000	98.438.750	93,80%	7%	104.950.000	6.511.250	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 laporan	24 laporan	100%	30.999.000	22.350.438	72,10%	39%	30.999.000	8.648.562	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan	3 laporan	100%	116.170.600	104.577.400	90,02%	11%	116.170.600	11.593.200	Efisien
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	113.034.300	110.855.921	98,07%	2%	113.034.300	2.178.379	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	6 unit	100%	32.304.300	30.554.148	94,58%	6%	32.304.300	1.750.152	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100%	75.145.000	74.751.773	99,48%	1%	75.145.000	393.227	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	20 unit	100%	5.585.000	5.550.000	99,37%	1%	5.585.000	35.000	Efisien

Formulasi untuk menghitung perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \left(\frac{(\text{capaian kinerja} \times \text{pagu anggaran}) - \text{realisasi anggaran}}{\text{realisasi anggaran}} \right) \times 100\%$$

Sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat pada Kecamatan Klambu tahun 2024 dengan indikator kinerja target nilai IKM sebesar 77,70 dan realisasi nilai IKM sebesar 85,27 memperoleh persentase capaian sebesar 110%. Sedangkan untuk pagu anggaran sebesar Rp.59.634.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.57.091.600 memperoleh persentase capaian sebesar 96%. Jika melihat perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran pada Kecamatan Klambu mendapatkan tingkat efisiensi sebesar 15% dengan intepretasi **efisien**.



Sedangkan pada sasaran kedua meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Klambu tahun 2024 dengan indikator kinerja target nilai SAKIP sebesar 70 dan realisasi nilai SAKIP sebesar 74,1 memperoleh persentase capaian sebesar 106%. Untuk pagu anggaran sebesar Rp.2.340.221.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.202.374.224 memperoleh persentase capaian sebesar 94%. Jika melihat perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran maka mendapatkan tingkat efisiensi sebesar 12% dengan interpretasi **efisien**.



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
a.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	110%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	Menunjang
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	Menunjang
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	Menunjang



				Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	100%	Menunjang
				Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	Menunjang



b.	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	106%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	Menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Menunjang



				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang



				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terehabilitasi/terpelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	100%	Menunjang

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa terdapat 4 Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dan terdapat 0 Program yang tidak



menunjang. Dari 10 Kegiatan yang telah dilaksanakan, 10 Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan terdapat 0 Kegiatan yang tidak menunjang

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah 4 program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Program tersebut adalah :

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- C. PROGRAM PENYELENGRAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dari keempat program tersebut dapat diuraikan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direalisasikan secara maksimal. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memperoleh capaian indicator kinerja 100%
 - b. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memperoleh capaian indicator kinerja 100%
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memperoleh capaian indikator kinerja 100%



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan memperoleh capaian indikator kinerja 100%



1. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- C. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh capaian indikator kinerja 100%
- D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa memperoleh capaian indikator kinerja 100%.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Rp. 2.340.221.500	Rp. 2.202.374.224	95,74%
a.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 21.795.200	Rp. 21.790.000	94,11%
a.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 21.795.200	Rp. 21.790.000	94,11%
a.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.766.895.000	Rp. 1.662.993.745	99,98%
a.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.766.895.000	Rp. 1.662.993.745	99,98%
a.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 21.943.000	Rp. 21.181.000	94,12%
a.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 21.943.000	Rp. 21.181.000	94,12%
a.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 116.393.500	Rp. 112.375.771	96,53%
a.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.886.300	Rp. 1.789.000	96,53%



a.4.2.	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 49.000.000	Rp. 48.829.000	96,55%
a.4.3.	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 21.062.200	Rp. 20.889.600	94,84%
a.4.4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 44.445.000	Rp. 40.868.171	99,65%
a.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 48.040.900	Rp. 47.811.199	99,18%
a.5.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 48.040.900	Rp. 47.811.199	91,95%
a.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 252.119.600	Rp. 225.366.588	99,52%
a.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 104.950.000	Rp. 98.438.750	99,52%
a.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 30.999.000	Rp. 22.350.438	89,39%
a.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 116.170.600	Rp. 104.577.400	93,80%
a.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 113.034.300	Rp. 110.855.921	72,10%



a.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 32.304.300	Rp. 30.554.148	90,02%
a.7.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 75.145.000	Rp. 74.751.773	98,07%
a.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 5.585.000	Rp.5.550.000	94,58%
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 22.681.000	Rp.20.247.400	99,48%
b.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 22.681.000	Rp.20.247.400	99,37%
b.1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 22.681.000	Rp.20.247.400	89,27%
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 21.953.500	Rp. 21.844.200	89,27%



c.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 21.953.500	Rp.21.844.200	89,27%
c.1.1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 21.953.500	Rp.21.844.200	99,50%
D.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 15.000.000	Rp.15.000.000	99,50%
d.1.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 15.000.000	Rp.15.000.000	99,50%
d.1.1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 15.000.000	Rp.15.000.000	100,00%
	JUMLAH	Rp. 2.399.856.000	Rp. 2.259.465.824	94,15%



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108% (kategori sangat tinggi). Nilai ini diperoleh dari nilai rata-rata pencapaian sasaran.
- Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 110% (kategori sangat baik)



- Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 106% (kategori sangat baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.399.856.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.259.465.824 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 94,15% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 5,85%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Klambu, 19 Januari 2025



CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

RUSTAMAJI, S.S.T.P. M.Si.,

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19871013 200602 1 002



LAMPIRAN – LAMPIRAN



LAMPIRAN

SK TIM SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KLAMBU

Jalan Raya Klambu Kudus Nomor 30, Klambu, Grobogan, Jawa Tengah 58154,
Telepon (0292) 77002858
Laman klambu.kec.grobogan.go.id, Pos-el kecamatanklamby@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.6.3/01/KECKLMB/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KECAMANTAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**

CAMAT KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan Keputusan Camat Klambu Kabupaten Grobogan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;



6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain:
 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
 3. Proses Bisnis Perangkat Daerah;
 4. Dokumen Keterkaitan Perangkat Daerah;
 5. Laporan Kinerja;
 6. Perjanjian Kinerja;
 7. Pengukuran Kinerja;
 8. LKJIP Perangkat Daerah;
 9. DPA Perangkat Daerah;
 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 11. Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 12. Cascading Perangkat Daerah;
 13. Review dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Klambu Kabupaten Grobogan



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Klambu
Pada tanggal : 16 Januari
2024



MAT KLAMBU

RUSTAMAJI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.6.3/01/KECKLMB/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Rustamaji, S.STP., M.Si.	Camat Klambu	Penanggung Jawab
2.	Jaidah, S.Sos., M.M.	Sekretaris Kecamatan Klambu	Ketua
3.	Endar Prasetyo Aji, S.Sos.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Hari Widodo, S.Sos.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
5.	Sukarno, S.Sos.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Abdul Rois, S.H.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Tri Agus Suprihadi, S.Sos.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8.	Arif Adinugroho, AMd. Kom.	Plt. Kasubag Keuangan	Anggota
9.	Muhamad Nur Huda, S.H.I.	Staf	Anggota
10.	Yasin Yusuf	Staf	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
Kecamatan Klambu
CAMAT KLAMBU
RUSTAMAJI



LAMPIRAN

TABEL MATRIKS

PERUBAHAN RENSTRA

2021-2026



Tabel Matriks Perubahan Renstra 2021-2026

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.01	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.				418	2,290,999,200	428	2,300,938,889	428	2,336,342,477	518	2,401,184,928	519	2,419,084,884			Kecamatan Klambu



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen							1	22555000	1	22555000	1	22555000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%			14	1,807,492,000	14	1,888,751,534	14	1,894,868,477	100	1,909,007,928	100	1,911,794,884			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		bulan			14	1,807,492,000	14	1,888,751,534									
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan							14	1,872,313,477	100	1886452928	100	1889239884			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket							18	11,524,000	18	11,524,000	19	12,500,000				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%			100	167,161,200	100	166,263,000	100	186,437,000	100	190,081,000	100	195,651,000				

[illegible]



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Unit			5505	40,195,000	5505	42,985,000	5505	34,955,000	5,505	36,925,000	5,505	38,895,000			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket							5505	34,955,000	5,505	36,925,000	5,505	38,895,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		Unit			288	4,200,000	288	5,200,000	288	5,700,000	288	4,640,000	288	4,640,000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen							288	5,700,000	288	4,640,000	288	4,640,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		Unit			2709	42,606,200	2715	36,272,000									
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket							2725	37,272,000	2,730	38,470,000	2,733	39,570,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali			858	71,788,000	970	73,000,000	12	79,204,000	12	80,240,000	12	82,240,000			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan							12	79,204,000	12	80,240,000	12	82,240,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Keluarga							1000	20.000.000	1000	20.000.000	1000	20.000.000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%			100	59,537,000	100	45,000,000	100	40,000,000	100	77,500,000	100	78,000,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Unit			11	59,537,000	12	45,000,000									
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Unit							12	30,000,000	12	67,500,000	10	68,000,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit							1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%				175,554,000	100	142,544,355	100	152,557,000	100	157,057,000	100	162,557,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bulan			12	67,640,000	100	58,000,000									
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan							12	59,000,000	12	60,000,000	12	61,000,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan			12	31,000,000	100	27,487,355									
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan							12	34,000,000	12	35,000,000	12	36,000,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan			12	76,914,000	100	57,057,000									
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan							12	59,557,000	12	62,057,000	12	65,557,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit							5	13,005,000	6	13,505,000	6	14,005,000			

[illegible]



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit							15	18,500,000	15	19,000,000	15	19,500,000				
7.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100	bulan			12	17,814,800	1	18,814,800	1	19,314,000	1	20,314,000	1	21,314,000				



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100				12	17,814,800	1	18,814,800	1	19,314,000	1	20,314,000	1	21,314,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan		Kali			1	17,814,800	1	18,814,800										
			Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan							1	19,314,000	1	20,314,000	1	21,314,000				



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif						-	-	12,500,000	-	35,000,000	-	-	-	40,000,000			PMD
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa						-		12,500,000		35,000,000		-		40,000,000			PMD
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes									12	35,000,000							

[illegible]

[illegible]



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
7.01.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) aktif dibagi jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) Aktif	persen				-		-		13,000,000	144	29,000,000	110	7,500,000			TRANTIBUM	



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dikali 100	persen				-			100	5,000,000	100	5,000,000	100	7,500,000			TRANTIB UM



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam		Kegiatan									1						



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan							12	3,000,000							
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB		Kegiatan									1						



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Laporan							12	3,000,000								



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dikali 100	kegiatan				-	10	-	10		10		10				TRANTIB UM

[illegible]



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan							10	2,000,000	10	24,000,000					



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	bulan			100	24,228,000	1	22,816,000	1	23,316,000	12	25,788,000	12	26,288,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	bulan			100	24,228,000	1	22,816,000	1	23,316,000	12	25,788,000	12	26,288,000			



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian		Orang															



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100							-		22,300,000	71	8,500,000	55	-			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100					-	71	-	58	22,300,000	71	8,500,000	55	-			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kegiatan									1						



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Dokumen							1	2,000,000								
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Desa					3		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000				



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Desa					13		13	2,000,000	13	2,000,000	13				13	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Dokumen							0	0	0	0	0					



Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Desa					13		13	2,500,000	13	2,500,000	13				13
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Laporan							0	0	0	0	0				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



LAMPIRAN

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KLAMBU

Jl. Raya Klambu – Kudus No. 30 Telp. (0292) 7702858
KLAMBU (58154)

KEPUTUSAN KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 051.2/31/II/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran



Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Grobogan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Camat Klambu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klambu
Pada tanggal 1 Februari, 2024



RUSTAMAJI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 051.2/31 /II /2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN
GROBOGAN

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Pembantu Bupati dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Kecamatan
3. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
4. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 051.2/31 /II /2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN
GROBOGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

NO.	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNG JAWAB
I.	Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.	Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan <i>good governance</i> dan manajemen kinerja yang berorientasi hasil.	Camat
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai LPPD	Nilai	Laporan Hasil Penilaian LPPD oleh Kemendagri	LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan	Camat



NO.	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNG JAWAB
					pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.		Sekcam
a.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat sasaran	%	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali 100.		
a.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dikali 100.		
a.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	%	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah		



NO.	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNG JAWAB
		tepat waktu		pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100		
a.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun Tepat Waktu		
a.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100		
a.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terpenuhi		
a.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100		
a.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi	unit	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		



NO.	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNG JAWAB
	Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Bangunan Kantor Terpenuhi		
a.4.2 .	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhi		
a.4.3 .	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit	Jumlah Penyediaan Bahan/Material Terpenuhi		
b.4.4 .	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksana		
a.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100		
a.5.1 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi		



NO.	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNG JAWAB
		diadakan				
a.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa		
a.6.1 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhi		
a.6.2 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi		
a.6.3 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi		
a.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik		
a.7.1 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Unit	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		



NO.	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNG JAWAB
	Dinas Jabatan			Jabatan Terpenuhi		
a.7.2	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpe liha	unit	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksana		
a.7.3	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	unit	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi		
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		bulan	Jumlah lembaga masyarakat aktif yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100		Kasi PMD
b.1.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100		



NO.	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNG JAWAB
b.1.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap				Kasi Kesra
c.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan				
c.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan				



NO.	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	SAT.	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN	PENANGGUNG JAWAB
	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
D.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					Kasi Tapem
d.1.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
d.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

A. Kecamatan Klambu
1. CAMAT KLAMBU

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.Si.

Jabatan : CAMAT KLAMBU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jabatan : BUPATI GROBOGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, Januari 2024



SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Pihak Pertama,

RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Meningkatnya Rata – rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,88	77,70
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP	B (64,25)	BB (70)

No.	Program	Anggaran (RP.)		Keterangan
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	Rp. 1.815.749.500	Rp. 2.094.020.500	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 16.153.500	-	APBD
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.	Rp. 22.833.000	Rp. 21.953.500	APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.	-	Rp. 20.000.000	APBD
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.	-	Rp. 15.000.000	APBD
	Jumlah	Rp. 1.854.736.000	Rp. 2.150.974.000	APBD

Klambu, Januari 2024

CAMAT KLAMBU



SR SUMARNI, S.H., M.M.



RUSTAMA J., S.S.T.P., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002

2. SEKRETARIS CAMAT

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS CAMAT KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JAIDAH, S.SOS., M.M.
Jabatan : Sekretaris Camat Klambu
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.
Jabatan : Camat Klambu Kabupaten Grobogan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002

Pihak Pertama,

JAIDAH, S.SOS., M.M.
Penata, III/d
NIP. 19730115 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1 Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %
2	Terselenggaranya Sistem Perencanaan dan Laporan yang andal	2 Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3	Laporan Keuangan Kecamatan Klambu	3 Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	
4	Meningkatnya Ketertiban Pengelolaan BMD	4 Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	
5	Meningkatnya keberfungsian Sarana dan Prasarana Kantor	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		6 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	
		7 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp21.795.200	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp21.795.200	APBD
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.518.039.000	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.518.039.000	APBD
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp21.943.000	APBD
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp21.943.000	APBD
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp123.956.000	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.886.300	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp49.000.000	APBD
	- Penyediaan Bahan/Material	Rp21.069.700	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rp52.000.000	APBD

	Konsultasi SKPD		
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp47.922.500	APBD
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp47.922.500	APBD
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp252.119.600	APBD
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp104.950.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Rp30.999.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp116.170.600	APBD
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp108.245.200	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp27.515.200	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp75.145.000	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp5.585.000	APBD
h.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp20.000.000	APBD
	- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp20.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp2.114.020.500	APBD

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002

Pihak Pertama,

JAIDAH, S.SOS., M.M.
Penata, III/d
NIP. 19730115 201001 2 001

2.a. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ENDAR PRASETYO AJI, S.SOS.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec. Klambu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JAIDAH, S.Sos., M.M.

Jabatan : Sekretaris Camat Klambu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


JAIDAH, S.SOS., M.M.
Penata, III/d

NIP. 19730115 201001 2 001


ENDAR PRASETYO AJI, S.SOS
Penata Muda, III/b
NIP. 19861102 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Program Administrasi Umum	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100 %
		2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
2	Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp21.943.000	APBD
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp21.943.000	APBD
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp123.956.000	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.886.300	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp49.000.000	APBD
	- Penyediaan Bahan/Material	Rp21.069.700	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp52.000.000	APBD
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp47.922.500	APBD
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp47.922.500	APBD
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp108.245.200	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp27.515.200	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp75.145.000	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp5.585.000	APBD

e.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp20.000.000	
	- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp20.000.000	
	JUMLAH	Rp322.066.700	APBD

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



JAIDAH, S.Sos., M.M.

Penata, III/d

NIP. 19730115 201001 2 001

Pihak Pertama,



ENDAR PRASETYO AJI, S.Sos.

Penata Muda, III/b

NIP. 19861102 200604 1 003

2.b. STAF SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA STAF SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HARYONO, S.PD.

Jabatan : Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec. Klambu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JAIDAH, S.Sos., M.M.

Jabatan : Sekretaris Camat Klambu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

JAIDAH, S.SOS., M.M.

Penata, III/d

NIP. 19730115 201001 2 001

HARYONO, S.PD.

Penata Muda, III/b

NIP. 19780415 201409 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STAF SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Program Administrasi Umum	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100 %
		2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
2	Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp21.943.000	APBD
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp21.943.000	APBD
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp123.956.000	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.886.300	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp49.000.000	APBD
	- Penyediaan Bahan/Material	Rp21.069.700	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp52.000.000	APBD
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp47.922.500	APBD
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp47.922.500	APBD
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp108.245.200	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp27.515.200	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp75.145.000	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp5.585.000	APBD

e.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp20.000.000	
	- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp20.000.000	
	JUMLAH	Rp322.066.700	APBD

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



JAIDAH, S.Sos., M.M.

Penata, III/d

NIP. 19730115 201001 2 001

Pihak Pertama,



HARYONO, S.PD.

Penata Muda, III/b

NIP. 19780415 201409 1 004

2.c. STAF PENGELOLA KEUANGAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA STAF PENGELOLA KEUANGAN KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIF ADINUGROHO, A.MD., KOM.

Jabatan : Pengelola Keuangan Kec. Klambu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JAIDAH, S.SOS., M.M.

Jabatan : Sekretaris Camat Klambu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

JAIDAH, S.SOS., M.M.

Penata, III/d

NIP. 19730115 201001 2 001

Pihak Pertama,

ARIF ADINUGROHO, A.MD., KOM.

Pengatur, II/c

NIP. 19890225 202012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STAF PENGELOLA KEUANGAN KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Laporan Keuangan/ LPJ Sesuai Peraturan Perundangan	1 Dokumen Daya Serap Anggaran	100 %
		2 Dokumen Laporan Keuangan/LPJ sesuai peraturan perundangan	
		3 Dokumen LRA	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp21.795.200	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp21.795.200	APBD
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.518.039.000	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.518.039.000	APBD
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp252.119.600	APBD
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp104.950.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Rp30.999.000	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp116.170.600	APBD
	JUMLAH	Rp1.791.953.800	APBD

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

JAIDAH, S.SOS., M.M.
 Penata, III/d
 NIP. 19730115 201001 2 001

Pihak Pertama,

ARIF ADINUGROHO, A.MD., KOM.
 Pengatur, II/c
 NIP. 19890225 202012 1 004

3. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUKARNO, S.SOS.

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Klambu
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.

Jabatan : Camat Klambu Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, 2 Januari 2024



Pihak Kedua,

RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002

Pihak Pertama,

SUKARNO, S.SOS.

Penata, III/c

NIP. 19750828 200901 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN
KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Program dan Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Desa	100 %
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	
		3 Fasilitas Bantuan Keuangan Pemerintah Desa	
		4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		5 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp15.000.000	APBD
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp15.000.000	APBD
	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp15.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp15.000.000	APBD

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002

Pihak Pertama,

SUKARNO, S.SOS.
Penata, III/c
NIP. 19750828 200901 1 006

4. KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HARI WIDODO, S.SOS.

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kec. Klambu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.Si.

Jabatan : Camat Klambu Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002

Pihak Pertama,

HARI WIDODO, S.SOS.

Penata, III/d

NIP. 19700110 199403 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan di Wilayah Kecamatan	1 Jumlah Laporan Capaian Standar Pelayanan di Wilayah Kecamatan	100 %
2	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan	3 Tingkat kepuasan masyarakat	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	-	Rp0	
	JUMLAH		

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002

Pihak Pertama,


HARI WIDODO, S.SOS.

Penata, III/d
NIP. 19700110 199403 1 009

4.a. STAF PENGOLAH DATA PELAYANAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
STAF PENGOLAH DATA PELAYANAN KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI RAWIT

Jabatan : Staf Pengolah Data Pelayanan Kec. Klambu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HARI WIDODO, S.SOS.

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum Kec. Klambu

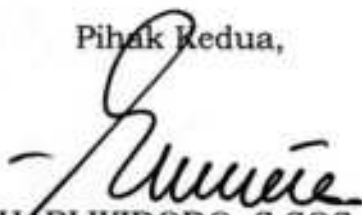
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,


HARI WIDODO, S.SOS.

Penata, III/d

NIP. 19700110 199403 1 009

Pihak Pertama,


SITI RAWIT

Penata Muda, III/b

NIP. 19720821 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STAF PENGOLAH DATA PELAYANAN KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan di Wilayah Kecamatan	1 Jumlah Laporan Capaian Standar Pelayanan di Wilayah Kecamatan	100 %
2	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Terciptanya kondisi pelayanan prima di kecamatan	3 Tingkat kepuasan masyarakat	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	-	Rp0	
	JUMLAH		

Pihak Kedua,


HARI WIDODO, S.SOS.
 Penata, III/d
 NIP. 19700110 199403 1 009

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,


SITI RAWIT
 Penata Muda, III/b
 NIP. 19720821 199503 2 001

5. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRI AGUS SUPRIHADI, S.SOS.

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kec. Klambu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.

Jabatan : Camat Klambu Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002

TRI AGUS SUPRIHADI, S.SOS.
Penata, III/c
NIP. 19690824 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM	1 Laporan Program Bantuan Sosial (PKH, BLT, PMKS, dan Bantuan Sosial Lainnya) 2 Jumlah Rekomendasi (Pendirian Lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal Bantuan Hibah dan Bansos) 3 Laporan Kejadian Bencana Alam 4 Permohonan Penyaluran Bantuan Bencana Alam Dan Bencana Sosial 5 Data Organisasi Keagamaan, Kepemudaan, Pendidikan Formal dan Non Formal 6 Jumlah Masyarakat/ Lembaga yang Layak Menerima Bantuan Sosial dan Keagamaan	100 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	-	Rp0	
	JUMLAH		

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.
 Pembina, IV/a
 NIP. 19871013 200602 1 002

Pihak Pertama,

TRI AGUS SUPRIHADI, S.SOS.
 Penata, III/c
 NIP. 19690824 200701 1 009

6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABDUL ROIS, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Klambu
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.

Jabatan : Camat Klambu Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002

Pihak Pertama,

ABDUL ROIS, S.H.

Penata Muda, III/b

NIP. 19701207 200801 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN
KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Jumlah Satpol PP yang melakukan pengamanan kantor 2 Jumlah anggota Linmas yang terbina 3 Laporan Inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin	100 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp21.953.500	APBD
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp21.953.500	APBD
	JUMLAH	Rp21.953.500	APBD

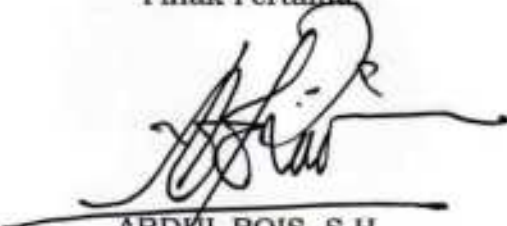
Klambu, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



ROSTAMA, F. S. T.P., M.Si.
 Pembina, IV/a
 NIP. 19871013 200602 1 002

Pihak Pertama


 ABDUL ROIS, S.H.
 Penata Muda, III/b
 NIP. 19701207 200801 1 006



LAMPIRAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN TA. 2024

REALISASI FISIK DAN KEGIATAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Bulan : Desember 2024
SKPD : KECAMATAN KLAMBU
Penanggung Jawab : Rustamaji, S.STP, M. Si

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
				Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	%	Tertimbang Fisik	Fisik (%)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.0.00.0.00.15.00	KECAMATAN KLAMBU		2.399.856.000	2.016.994.772	242.471.052	2.259.465.824	94,15	2.278.855.936	94,96	140.390.176	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		2.399.856.000	2.016.994.772	242.471.052	2.259.465.824	94,15	2.278.855.936	94,96	140.390.176	
7.01	KECAMATAN	Rustamaji, S.STP, M.Si	2.399.856.000	2.016.994.772	242.471.052	2.259.465.824	94,15	2.278.855.936	94,96	140.390.176	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.340.221.500	1.967.283.172	235.091.052	2.202.374.224	94,11	2.221.489.536	94,93	137.847.276	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rustamaji, S.STP, M.Si	21.795.200	21.790.000	0	21.790.000	99,98	21.795.200	100,00	5.200	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rustamaji, S.STP, M.Si	21.795.200	21.790.000	0	21.790.000	99,98	21.795.200	100,00	5.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rustamaji, S.STP, M.Si	1.766.895.000	1.504.053.563	158.940.182	1.662.993.745	94,12	1.678.550.250	95,00	103.901.255	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rustamaji, S.STP, M.Si	1.766.895.000	1.504.053.563	158.940.182	1.662.993.745	94,12	1.678.550.250	95,00	103.901.255	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rustamaji, S.Sos, M.Si	21.943.000	21.181.000	0	21.181.000	96,53	21.943.000	100,00	762.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rustamaji, S.Sos, M.Si	21.943.000	21.181.000	0	21.181.000	96,53	21.943.000	100,00	762.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rustamaji, S.STP, M.Si	116.393.500	88.939.771	23.436.000	112.375.771	96,55	112.743.585	96,86	4.017.729	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rustamaji, S.STP, M.Si	1.886.300	489.000	1.300.000	1.789.000	94,84	1.791.985	95,00	97.300	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rustamaji, S.STP, M.Si	49.000.000	42.733.000	6.096.000	48.829.000	99,65	49.000.000	100,00	171.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Rustamaji, S.STP, M.Si	21.062.200	15.989.600	4.900.000	20.889.600	99,18	21.062.200	100,00	172.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rustamaji, S.STP, M.Si	44.445.000	29.728.171	11.140.000	40.868.171	91,95	40.889.400	92,00	3.576.829	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rustamaji, S.S.T.P, M.Si	48.040.900	47.311.199	500.000	47.811.199	99,52	48.040.900	100,00	229.701	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rustamaji, S.S.T.P, M.Si	48.040.900	47.311.199	500.000	47.811.199	99,52	48.040.900	100,00	229.701	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rustamaji, S.STP, M.Si	252.119.600	182.769.826	42.596.762	225.366.588	89,39	226.997.516	90,04	26.753.012	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rustamaji, S.STP, M.Si	104.950.000	80.726.250	17.712.500	98.438.750	93,80	98.653.000	94,00	6.511.250	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rustamaji, S.Sos, M.Si	30.999.000	18.727.426	3.623.012	22.350.438	72,10	22.629.270	73,00	8.648.562	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rustamaji, S.STP, M.Si	116.170.600	83.316.150	21.261.250	104.577.400	90,02	105.715.246	91,00	11.593.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rustamaji, S.STP, M.Si	113.034.300	101.237.813	9.618.108	110.855.921	98,07	111.419.085	98,57	2.178.379	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rustamaji, S.STP, M.Si	32.304.300	27.336.040	3.218.108	30.554.148	94,58	30.689.085	95,00	1.750.152	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rustamaji, S.STP, M.Si	75.145.000	71.251.773	3.500.000	74.751.773	99,48	75.145.000	100,00	393.227	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rustamaji, S.STP, M.Si	5.585.000	2.650.000	2.900.000	5.550.000	99,37	5.585.000	100,00	35.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		22.681.000	12.867.400	7.380.000	20.247.400	89,27	20.412.900	90,00	2.433.600	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Rustamaji, S.STP, M.Si	22.681.000	12.867.400	7.380.000	20.247.400	89,27	20.412.900	90,00	2.433.600	

Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi						Sisa Anggaran	Keterangan
				Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	%	Tertimbang Fisik	Fisik (%)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rustamaji, S.STP, M.Si	22.681.000	12.867.400	7.380.000	20.247.400	89,27	20.412.900	90,00	2.433.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		21.953.500	21.844.200	0	21.844.200	99,50	21.953.500	100,00	109.300	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rustamaji, S.S.T.P, M.Si	21.953.500	21.844.200	0	21.844.200	99,50	21.953.500	100,00	109.300	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rustamaji, S.S.T.P, M.Si	21.953.500	21.844.200	0	21.844.200	99,50	21.953.500	100,00	109.300	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	0	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rustamaji, S.STP, M.Si	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	0	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rustamaji, S.STP, M.Si	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	0	

GROBOGAN, 31 Desember 2024

CAMAT KLAMBU



Rustamaji, S.STP, M. Si
NP. 19871013 200602 1 002



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

